


Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Kinerja Ukm Pangan

Muzakar Isa 

¹ Department of Management Universitas Muhammadiyah Surakarta

 muzakar.isa@ums.ac.id

Abstract

The performance of SMEs is a strategic issue for regional economic development. Institutional design and high transaction costs are the drivers of the low performance of SMEs. This study aims to analyze the effect of institutional design on the performance of SMEs, analyze the effect of the existence of transaction costs on the performance of SMEs, and analyze the effect of institutional design and transaction costs on the performance of SMEs. This research was conducted in flood-prone areas in Klaten Regency, Central Java Province. The research population is all food SME business actors who have experienced flooding at least 3 times. Sampling using purposive sampling method, and taken as many as 100 respondents. This study uses primary data collected through structured interviews. This study uses 2 analytical tools, namely the index and multiple linear regressions. The results showed that Klaten is a district with an index of regional resilience to flooding in the medium category. Sensitivity is the lowest aspect of regional resilience where income and public health are the main causes of low sensitivity. Food SMEs in Klaten district consisting of rice farming businesses, rice cultivators, rice collectors, selean, wholesalers and retail traders have a level of resilience in the medium category, where suppliers are the strongest forming aspect of resilience and the weakest forming aspect is labor. Institutional design has a positive and significant impact on the performance of food SMEs, where the better the institutional design, the better the performance of SMEs. While transaction costs have a negative and significant effect on the performance of food SMEs, where the higher transaction costs will affect the lower performance of SMEs.

Keywords: Institutional design; Transaction Fees; SME Performance

Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Kinerja Ukm Pangan

Abstrak

Kinerja UKM merupakan isu strategis bagi pembangunan ekonomi daerah. Desain kelembagaan dan masih tingginya biaya transaksi menjadi pendorong masih rendahnya kinerja UKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desain kelembagaan terhadap kinerja UKM, menganalisis pengaruh keberadaan biaya transaksi terhadap kinerja UKM, dan menganalisis pengaruh desain kelembagaan dan biaya transaksi terhadap kinerja UKM. Penelitian ini dilakukan di daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah semua pelaku usaha UKM pangan yang pernah mengalami banjir minimal sebanyak 3 kali. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan diambil sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur. Penelitian ini menggunakan 2 alat analisis, yaitu indeks dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Klaten merupakan kabupaten dengan indeks ketahanan wilayah atas banjir pada kategori sedang. Sensitivitas merupakan aspek pembentuk ketahanan wilayah paling rendah dimana pendapatan dan kesehatan masyarakat menjadi penyebab utama sensitivitas nilainya rendah. UKM pangan di kabupaten Klaten terdiri dari usaha pertanian padi, penembas padi, pengepul padi, selean, pedagang grosir dan pedagang eceran memiliki tingkat ketahanan pada kategori sedang, dimana pemasok menjadi aspek pembentuk ketahanan yang paling kuat dan aspek pembentuk paling lemah adalah tenaga kerja. Desain kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan, dimana semakin baik desain kelembagaan maka juga semakin baik kinerja UKM. Sedangkan biaya transaksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan, dimana semakin tinggi biaya transaksi akan berpengaruh semakin rendah kinerja UKM.

Kata kunci: Desain kelembagaan; Biaya Transaksi; Kinerja UKM

1. Pendahuluan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) beras berperan penting dalam pencapaian ketahanan pangan [1], dimana sebesar 90% produk pangan Kabupaten Klaten disediakan oleh UKM [1, 2]. Kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada berbagai macam hambatan, seperti ketersediaan tenaga kerja terampil, adopsi teknologi, permodalan dan juga pemasaran [3]. Faktor penghambat ini didominasi oleh dua faktor yaitu kelembagaan dan pembiayaan. Penguatan kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten harus memperhatikan dua faktor penghambat utama tersebut, sehingga desain kelembagaan menjadi penting untuk menganalisis kinerja UKM pangan. Artikel ini memandang kelembagaan sebagai *rules of the game* yang hidup dan berjalan bersama realitas sosial pelaku usaha.

Kelembagaan dicirikan oleh tiga hal [4], yaitu: pemaksaan terhadap hak kepemilikan, membatasi tindakan-tindakan politisi, elite, dan kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya memperoleh keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar, dan memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengerjakan aktivitas. Pemikiran nomor pertama dan kedua mengarahkan desain kelembagaan pada hak kepemilikan atas produk pangan dan terciptanya *equal opportunity* dikalangan pelaku UKM pangan. Dalam teori ekonomi kelembagaan baru, untuk mempelajari kelembagaan maka teori biaya transaksi merupakan konsep penjelas yang sangat krusial, berkebalikan dengan asumsi neoklasik yang tidak mengakui adanya biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi [5]. Biaya transaksi menjadi alat analisis untuk lebih mendalami permasalahan UKM pangan di Kabupaten Klaten, dimana semakin efisien biaya transaksi, maka desain kelembagaanpun juga semakin efisien, dan sebaliknya.

Biaya transaksi UKM pangan timbul akibat adanya asimetri informasi, dimana pihak yang menguasai informasi cenderung bersikap oportunistik sehingga menyebabkan munculnya biaya transaksi tinggi [5, 6]. Jika biaya transaksi terlalu tinggi, maka jual beli tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan [6]. Teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh teori Coase (*Coase Theorem*) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan cuma akibat adanya struktur pasar yang tidak sempurna, melainkan karena adanya biaya transaksi [7].

Muncul dan perkembangan teori biaya transaksi berawal dari lingkup organisasi perusahaan, tetapi dipahami bersama bahwa asimetri informasi dan oportunisme yang menimbulkan biaya transaksi juga menjadi salah satu penghambat laju pertumbuhan ekonomi [7]. Tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten adalah bagaimana mengurangi biaya transaksi sehingga dibutuhkan desain kelembagaan yang tepat. Semakin tinggi biaya transaksi dan buruknya desain kelembagaan mengakibatkan kinerja UKM mengalami stagnasi.

Penguatan kinerja ekonomi Kabupaten Klaten perlu dilakukan melalui studi kelembagaan UKM. Buruknya desain kelembagaan dan tingginya biaya transaksi pada aktivitas pelaku UKM menghambat kinerja UKM dan berdampak pada tidak optimalnya kinerja perekonomian daerah. Dengan ini, perlu penelitian yang menganalisis pengaruh desain kelembagaan terhadap kinerja UKM, menganalisis pengaruh keberadaan biaya transaksi terhadap kinerja UKM, dan menganalisis pengaruh desain kelembagaan dan biaya transaksi terhadap kinerja UKM.

2. Literatur Review

2.1. Teori Ekonomi Biaya Transaksi

Teori perusahaan yang digagas oleh kelompok ekonom neoklasik tahun 1950an banyak menerima kritikan dari berbagai pihak. Kritik tersebut antara lain terkait sejumlah asumsi yang dinilai tidak realistis, khususnya mengenai sifat dasar dari rasionalitas manusia [8]. Rasionalitas dalam perspektif ekonom neoklasik dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan kepuasan dan juga keuntungan [9].

Dalam perkembangan ilmu ekonomi banyak tawaran konseptual yang diajukan mengenai tujuan utama perusahaan. Setidaknya terdapat empat konseptual tentang tujuan utama perusahaan [8], yaitu (1) memuaskan ambisi manajer, (2) memaksimalkan *general preferences function*, yang merupakan agregasi dari aspirasi sejumlah individu

anggota sebuah perusahaan, (3) sekedar bertahan hidup, dan (4) perusahaan eksis bukan untuk menciptakan profit yang memuaskan.

Kemunculan teori biaya transaksi merupakan turunan dari adanya asumsi mengenai sifat rasionalitas yang terbatas dalam diri individu dan pelaku ekonomi. Karena rasionalitas manusia bersifat terbatas maka eksistensi dari biaya transaksi selalu bersifat positif. Teori ekonomi biaya transaksi berusaha untuk menganalisa organisasi dari perspektif manusia yang didasarkan pada asumsi rasionalitas terbatas. Dalam pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*) teori biaya transaksi merupakan konsep penjelas dalam mempelajari institusi dan organisasi [5]. Berkebalikan dengan teori neoklasik yang mengasumsikan tidak adanya biaya transaksi, perspektif ekonomi kelembagaan baru berusaha menjadikannya sebagai alat analisis untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dunia nyata, dimana biaya transaksi selalu hadir dalam tiap aktivitas ekonomi. Dengan ini, pendekatan ekonomi kelembagaan baru lebih realistis dibandingkan dengan pendekatan teori neoklasik. Salah satu alat analisisnya yang populer adalah ekonomi biaya transaksi (*Transaction cost economics*). Alat analisis ini sering digunakan untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi (transaksi), berarti kian tidak efisien kelembagaan yang didesain, demikian sebaliknya [7].

2.2. Konsep Biaya Transaksi

Konsep biaya transaksi pertama kali diperkenalkan oleh Coase tahun 1937 melalui artikenya yang berjudul *The Nature of The Firm* [7]. Teori ekonomi biaya transaksi merupakan teori ekonomi yang menganalisa sejumlah alasan mengenai eksistensi perusahaan serta batasan-batasannya dalam konteks dimana pasar dan organisasi dipertimbangkan sebagai alternative bagi mekanisme aturan pertukaran [10]. Dalam memahami konsep biaya transaksi tak bisa dilepaskan dari pemahaman atas aktivitas yang meliputi proses transaksi dan kontrak. Unit analisis dari konsep biaya transaksi ekonomi terletak pada transaksi itu sendiri. Coase mendefinisikan kontrak sebagai keberlanjutan dari hubungan komersil [11, 12].

Coase menjelaskan eksistensi perusahaan adalah hubungan kontrak yang berkelanjutan merupakan alternative menuju transaksi pasar dan melalui beberapa hubungan orang – orang dapat menghindari adanya biaya transaksi. Namun hubungan ini tidak bebas dengan sendirinya, sebab untuk mengembangkan dan memelihara dibutuhkan penggunaan sumberdaya yang pengeluarannya diperhitungkan sebagai opportunity cost [12].

Biaya Transaksi meliputi biaya negosiasi (*negotiating cost*), biaya monitoring (*monitoring cost*), dan biaya pemaksaan kontrak (*enforcing cost*) sebagai bagian dari komponen biaya transaksi [10]. Ketiga komponen ini merupakan representasi dari proses yang berlangsung dalam sebuah kontrak yang meliputi aktivitas pra kontrak, penemuan partner potensial serta negosiasi dan aktivitas yang berlangsung pasca kesepakatan kontrak. Coase juga membuat tiga kategori biaya transaksi, yakni; pertama, biaya penemuan harga yang relevan meliputi biaya pencarian. Biaya pencarian adalah nilai dari sumberdaya yang digunakan oleh orang-orang untuk menemukan partner potensial dalam rangka melaksanakan pertukaran sukarela, baik secara bilateral maupun multilateral. Kedua, biaya negosiasi. Biaya ini merupakan nilai dari sumberdaya yang digunakan dalam proses perundingan dengan partner potensial untuk mencapai bentuk kesepakatan yang sama-sama memuaskan. Dan yang terakhir adalah biaya mengakhiri pertukaran, yakni nilai dari sumberdaya yang digunakan oleh partisipan lain agar memenuhi seluruh isi kesepakatan kontrak [12].

Teori ekonomi biaya transaksi yang digagas oleh Williamson merupakan teori yang membicarakan tentang perusahaan dalam posisinya sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menghindari negativitas [8]. Dalam hal ini ada tiga jenis negativitas yang perlu dihindari oleh perusahaan yakni: Pertama, perusahaan sebagai entitas yang berupaya untuk menghindari timbulnya biaya pertukaran yang tinggi dipasar. Kedua, sebagai sebuah entitas yang berupaya menghindari resiko yang timbul akibat adanya sejumlah masalah. Ketiga, sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menghindari hubungan (relasi) pasar yang opportunistic.

Biaya transaksi adalah biaya untuk menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan [6]. Biaya transaksi merupakan

biaya – biaya yang timbul dalam suatu proses transaksi mulai dari tahap pra produksi, produksi, hingga pada tahap pasca produksi, dan biaya tersebut tidak terhitung sebagai biaya produksi atau biaya pengadaan faktor – faktor produksi. Biaya transaksi tersebut terdiri dari biaya pencarian informasi (*search information cost*), biaya negosiasi (*negotiation cost*), dan biaya kesepakatan (*concluding cost*).

- 1) Biaya pencarian informasi (*search information cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pencarian informasi terkait berbagai kegiatan sebelum melakukan produksi antara lain; pencarian harga bahan
- 2) Biaya negosiasi (*negotiation cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan negosiasi dengan pihak klien, supplier, atau customer terkait berbagai hal baik sebelum dimulainya produksi maupun pada saat produksi sedang berlangsung. Hal – hal yang menjadi objek negosiasi antara lain; jumlah, standar kualitas, harga bahan baku, mekanisme pengiriman bahan baku, mekanisme pengantaran/pengambilan hasil produksi (pesanan), desain, konsep, dan sebagainya
- 3) Biaya kesepakatan (*concluding cost*), merupakan biaya yang timbul akibat adanya kesepakatan terkait proses produksi umumnya dilakukan pada tahap pra produksi. Kesepakatan – kesepakatan tersebut meliputi harga, standar kualitas, dan jumlah bahan baku, mekanisme pengiriman bahan baku, pengantaran/pengambilan hasil produksi, desain, konsep produk, bagi hasil, fee marketing, dan sebagainya.

2.3. Pengukuran Biaya Transaksi

Isu utama dalam biaya transaksi adalah pengukuran. Factor- faktor yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga hal berikut :

- 1) *What : the identity of bundle of right (hak-hak atas komoditas)*
- 2) *Who : identity of agents involved in the exchanges*
- 3) *How : the institutions, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchanges*

Besaran biaya transaksi dapat terjadi karena adanya berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan
- 2) Penyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks (*multiple-task*) dan prinsip yang beragam
- 3) Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu nyata (*real time*), ketersembunyian informasi yang panjang, dan penyalahgunaan strategis
- 4) Penyimpangan yang muncul karena kelemahan kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi
- 5) Kelemahan integritas

Beberapa factor yang dapat menurunkan biaya transaksi menurut coase [12] antara lain: perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dapat menurunkan biaya transaksi karena melalui teknologi ketidakpastian yang timbul akibat ketidaksempurnaan informasi dapat dikurangi. Kemajuan teknologi informasi sangat membantu dalam mengurangi biaya pencarian (*search cost*). Social capital dapat merupakan sumberdaya pengetahuan dan organisasi yang dapat meningkatkan potensi individual ataupun tindakan kolektif dalam lingkup sistem social manusia.

2.4. Desain Kelembagaan.

Desain kelembagaan merupakan sinergitas antar berbagai stakeholder yang berkaitan dengan UKM pangan, antara lain: Petani, Penebas, Pengepul, Rice Mil Unit (selepan), Pelaku UKM, Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Investor. Salah satu yang mempengaruhi kinerja UKM adalah desain kelembagaannya [7, 11]. Berikut dimensi dan pengukuran aspek kelembagaan.

- 1) Kebijakan dan program pemerintah. Adapun dimensinya adalah (1) regulasi yang pro bisnis, (2) program pembinaan, (3) akses permodalan dan pembiayaan, dan (4) penyiapan lokasi dan ketersediaan informasi
- 2) Akses Permodalan. Setiap pelaku usaha membutuhkan modal, dimana sumber permodalan dapat berasal dari pihak internal yaitu modal sendiri, dan pihak eksternal atau pihak ketiga yaitu perbankan dan investor.
- 3) Akses Pasar dan Pemasaran. Kemampuan pelaku UKM dalam mengembangkan bisnisnya, salah satunya kemampuannya dalam menciptakan akses pasar dan

- pemasaran yang baik,
- 4) Hak kepemilikan. Kepemilikan aset fisik dan non fisik sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan bisnis. Hak kepemilikan aset fisik berupa tempat produksi, dan kepemilikan aset non fisik adalah legalitas dan kepemilikan hak cipta / hak paten.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah semua pelaku UKM yang berada dalam rantai pasok pangan, yang terdiri usaha pertanian, penembas, selepan, pedagang grosir beras, pedagang eceran beras, yang pernah mengalami banjir minimal sebanyak 3 kali. Jumlah populasi tidak diketahui secara pasti karena tidak ada data UKM pangan yang menjadi korban banjir. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* [13], dan diambil sebanyak 100 responden.

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian di lokasi penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan bertanya langsung kepada pelaku UKM menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dengan tujuan sebagai panduan peneliti serta untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden.

Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis, yaitu analisis indeks dan regresi linier berganda. Indeks digunakan untuk menyusun indeks kelembagaan, biaya transaksi dan kinerja UKM pangan. Pembentukan nilai indeks dilakukan dengan mengkompilasi semua nilai variabel penelitian dan selanjutnya mengnormalisasi angka tersebut untuk mendapatkan nilai antara 0 – 1 dengan menggunakan rumus berikut [14, 15].

$$I_j = \sum_{i=1}^k b_i \left[\frac{a_{ji} - x_i}{s_i} \right]$$

Dimana I: Nilai Indeks; b: nilai bobot, a: nilai indikator, x: nilai rata-rata indikator, s: nilai standar deviasi indikator, i: individu dalam UKM pangan, j: jenis variabel pembentuk indeks. Seterusnya penentuan nilai indeks ditentukan oleh penjumlahan total skor seluruh indikator penelitian dengan rumus sebagai berikut [16]:

$$\text{IndeksUKMpangan} = \sum_{i=1}^3 (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

Dimana indeks: nilai indeks UKM pangan, X₁-X₅: skor variabel penelitian.

Analisis Regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh desain kelembagaan dan biaya transaksi terhadap kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Tingkat Ketahanan Wilayah

Klaten merupakan kabupaten non-pesisir di Provinsi Jawa Tengah yang paling tidak tahan (rentan) terhadap bencana banjir [1]. Kabupaten Klaten memiliki nilai indeks ketahanan wilayah atas banjir sebesar 0,51, yang berarti berada dalam kategori kerentanan sedang. Sensitivitas merupakan aspek pembentuk ketahanan wilayah paling kecil nilainya, yaitu sebesar 0,32, diikuti kemampuan adaptasi sebesar 0,58 dan eksposur sebesar 0,61. Sensitivitas menjadi aspek utama yang harus diperbaiki untuk meningkatkan ketahanan wilayah. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian di wilayah pesisir yang menjelaskan eksposur sebagai aspek yang paling tidak tahan terhadap risiko banjir [16].

Sensitivitas merupakan aspek ketahanan yang menjelaskan tingkat kondisi individu dalam masyarakat, dan lingkungannya atas perubahan lingkungan eksternalnya, dalam hal ini bencana banjir, di suatu wilayah tertentu [16]. Aspek ini menggambarkan kondisi individu dari masyarakat yang terkena banjir. Pendapatan dan kesehatan masyarakat merupakan aspek sensitivitas yang paling rendah nilainya dalam menyebabkan ketahanan wilayah, sedangkan akses air bersih dan migrasi berada pada kategori ketahanan sedang. Tingkat ketahanan wilayah ini berdampak pada ketahanan UKM pangan di Kabupaten Klaten. Ketahanan wilayah merupakan salah satu aspek

lingkungan eksternal unit usaha yang berdampak terhadap kinerja UKM, yaitu bagaimana mungkin UKM pangan yang berada di wilayah tidak tahan banjir akan fokus ngurusi internal bisnisnya ketika aspek eksternalnya terganggu.

4.2. Ketahanan UKM Pangan terhadap Banjir

Ketahanan pangan dapat dicapai melalui ketahanan UKM pangan terhadap perubahan lingkungan eskternalnya, yang dalam hal ini disebut ketahanan UKM pangan terhadap banjir [1]. Ketahanan UKM merupakan suatu kondisi usaha yang mempunyai kemampuan untuk menghindar, dan menghadapi resiko dari perubahan lingkungan eksternal seperti bencana, perubahan kebijakan, dan perkembangan teknologi [13, 15, 16]. Ketahanan UKM atas banjir dapat dijelaskan melalui indeks ketahanan usaha. Indeks ini ditentukan oleh total skor seluruh indikator dari variabel ketahanan pemasok, ketahanan tenaga kerja, ketahanan modal dan ketahanan konsumen.

Indeks ketahanan UKM terhadap banjir sebesar 0,48, yang berarti bahwa UKM pangan di Kabupaten Klaten berada dalam kategori ketahanan sedang. Nilai indeks berada pada rentang 0-1. Semakin mendekati 1 maka nilainya semakin tinggi. Nilai indek dibagi menjadi 3 kelompok, rendah jika nilai kurang dari 0,34, sedang jika nilai berada pada rentang 0,34-0,66, dan tinggi jikalau di atas 0,67.

Pedagang grosir merupakan kelompok usaha yang paling tidak tahan (0,47), diikuti pedagang eceran (0,48) dan petani (0,48), serta yang terakhir adalah selepan (0,49). Pedagang grosir beras merupakan pelaku usaha yang paling rentan atas banjir. Mereka paling rentan terhadap aspek tenaga kerja. Pada saat dan pasca banjir, banyak tenaga kerja yang memilih untuk focus pada keperluan pribadinya sehingga banyak pelaku usaha kesulitan mencari tenaga kerja. Selain aspek tenaga kerja, pedagang grosir beras juga rentan terhadap pemasok beras, yaitu selepan. Pada saat banjir, selepan mengalami kekurangan pasokan yang juga berdampak pada pedagang gosir beras. Aspek modal dan konsumen bukan menjadi permasalahan utama karena mereka umumnya sudah memiliki cadangan modal dan tidak kesulitan untuk mencari tambahan modal. Dari sisi konsumen, karena stok beras yang sedikit, maka konsumen tidak menjadi masalah.

Tabel 1. Indeks Ketahanan UKM pangan di Daerah Rawan Banjir

Aspek Ketahanan	Petani	Selepan	Pedagang Grosir	Pedagang Eceran	Indeks
Pemasok	0,62	0,56	0,44	0,70	0,58
Modal	0,48	0,53	0,49	0,49	0,50
Tenaga Kerja	0,28	0,47	0,36	0,48	0,40
Konsumen	0,56	0,40	0,61	0,27	0,46
INDEKS	0,48	0,49	0,47	0,48	0,48

Sumbe

r: Data Primer Diolah (2021)

Usaha tani sangat rentan pada aspek tenaga kerja, dimana aspek tenaga kerja berada pada tingkat ketahanan yang rendah (0,28). Tenaga kerja merupakan komponen terpenting dalam usaha pertanian yang masih mengandalkan banyak tenaga manusia, dimana biaya tenaga kerja menjadi komponen tertinggi dalam struktur biaya produksi [17, 18]. Pada saat banjir, banyak tenaga kerja focus untuk keperluan individu mereka dan tidak mau bekerja sebagai buruh tani. ketahanan tenaga kerja yang paling rendah, selanjutnya dikuti oleh modal, konsumen dan pemasok.

Pedagang eceran atau toko beras merupakan unit usaha paling terakhir dalam rantai pasok sebelum konsumen. Mereka paling rentan terhadap konsumen dimana konsumen berada pada tingkat ketahanan yang rendah (0,27). Ketika ada banjir, pembelian beras menurun, hal ini terjadi karena focus utama konsumen pada aspek kesehatan bukan pada pembelian beras. ketahanan konsumen merupakan ketahanan yang paling rendah, diikuti oleh tenaga kerja, modal dan terakhir pemasok.

Usaha selepan paling rentan terhadap aspek konsumen. Selepan mendapatkan padi dari dari sekitar dan luar daerah, begitu juga untuk konsumennya. Selepan yang mayoritas konsumennya adalah masyarakt sekitar usaha, konsumen tidak focus pada pembelian beras pada saat banjir dan menyebabkan tingkat ketahanan konsumen merupakan yang paling rendah, dikuti oleh tenaga kerja, modal, dan pemasok.

Berdasarkan jenis aspek pembentuk ketahanan usaha, tenaga kerja merupakan jenis ketahanan UKM yang paling rendah, secara berurutan diikuti konsumen, modal dan

pemasok. Semua jenis pembentuk ketahanan ini berada pada kategori ketahanan sedang. Tenaga kerja merupakan aspek penting dalam kinerja perusahaan, khususnya perusahaan yang berada dalam rantai pasok padi dan beras [17]. Banyaknya perusahaan tekstil baru dalam skala besar berdampak pada minat tenaga kerja untuk bekerja pada sektor UKM pangan.

4.3. Kelembagaan dan Kinerja UKM Pangan

Kelembagaan dan kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten secara umum berada pada kategori sedang. Kinerja UKM berada pada nilai 0,49. Desain kelembagaan yang terdiri dari 4 (empat) dimensi [7], paling tinggi aspek kebijakan pemerintah dan hak kepemilikan dengan nilai 0,56 diikuti akses pasar dengan nilai 0,54 dan paling rendah permodalan dengan nilai 0,51. Nilai biaya transaksi lebih rendah dari paka kinerja UKM dan desain kelembagaan, dimana nilai indeks biaya pembuatan kesepakatan sebesar 0,45, biaya pencarian informasi sebesar 0,41 dan biaya negosiasi 0,37.

Tabel 2. Indeks kelembagaan, biaya transaksi dan kinerja UKM

Variabel	Dimensi	Nilai Indeks
Desain kelembagaan	Kebijakan Pemerintah	0,56
	Permodalan	0,51
	Akses pasar	0,54
	Hak kepemilikan	0,56
Biaya Transaksi	Biaya pencarian informasi	0,41
	Biaya Negosiasi	0,37
	Biaya pembuatan kesepakatan	0,45
Kinerja UKM		0,49

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan **tabel 3** dijelaskan desain kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan, dimana semakin baik desain kelembagaan maka juga semakin baik kinerja UKM. Adapun biaya transaksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten. Semakin tinggi biaya transaksi akan berpengaruh semakin rendah kinerja UKM.

Tabel 3. Pengaruh desain kelembagaan, biaya transaksi terhadap kinerja UKM

	Beta	T	Sig.
Konstanta	8,100	1,471	0,145
Desain kelembagaan	0,370	6,843	0,000
Biaya Transaksi	-0,101	-2,000	0,048
R	: 0,571		
R ²	: 0,326		
F	: 23,412		
sig	: 0,000		

Sumber: Data Primer Diolah (2021)

Berdasarkan **tabel 3** di atas dijelaskan bahwa bahwa desain kelembagaan yang terdiri dari dimensi akses pasar, akses permodalan, kebijakan dan program pemerintah, dan hak kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten. Akses pasar yang dibentuk secara kuat oleh kemampuan para pelaku UKM dalam mengenal pesaing dan produknya merupakan faktor utama dalam mendorong terbentuknya desain kelembagaan yang baik dan mendorong semakin baiknya kinerja UKM tersebut. Selanjutnya untuk akses permodalan, para pelaku UKM masih dominan mengandalkan modal sendiri dalam mengembangkan usahanya disebabkan terbatasnya akses ke pihak perbankan. Kemampuan akses permodalan ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya maka akan lebih cepat dalam meningkatkan kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten. Faktor kebijakan dan program pemerintah, dapat dijelaskan bahwa tersedianya informasi terkait dengan kebutuhan para pelaku UKM akan meningkatkan kinerja UK tersebut. Selain itu, regulasi yang pro terhadap pelaku UKM pangan juga akan menjadi faktor pendorong terbentuknya desain kelembagaan yang baik. Untuk faktor hak kepemilikan, faktor yang mempengaruhi secara kuat terbentuknya desain kelembagaan yang baik pada UKM pangan adalah adanya kepemilikan atas izin usaha dan tempat produksi. Kepemilikan tempat produksi yang murah dan semakin mudahnya mendapatkan izin usaha makin meningkatkan kinerja UKM pangan di

Kabupaten Klaten.

Terkait biaya transaksi, dijelaskan bahwa rendahnya biaya pencarian informasi, biaya tawar menawar dan biaya kesepakatan akhir yang dikeluarkan oleh para pelaku UKM berpengaruh terhadap kinerja UKM pangan di Kabupaten Klaten. Hal ini sejalan dengan Mburu (2002) yang menyatakan bahwa Jika biaya transaksi tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi menjadi stagnan.

5. Kesimpulan

Klaten merupakan kabupaten dengan indeks ketahanan wilayah atas banjir pada kategori sedang. Sensitivitas merupakan aspek pembentuk ketahanan wilayah paling rendah dimana pendapatan dan kesehatan masyarakat menjadi penyebab utama sensitivitas nilainya rendah. UKM pangan di kabupaten Klaten terdiri dari usaha pertanian padi, penembas padi, pengepul padi, selepan, pedagang grosir dan pedagang eceran memiliki tingkat ketahanan pada kategori sedang, dimana pemasok menjadi aspek pembentuk ketahanan yang paling kuat dan aspek pembentuk paling lemah adalah tenaga kerja. Desain kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan, dimana semakin baik desain kelembagaan maka juga semakin baik kinerja UKM. Sedangkan biaya transaksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja UKM pangan, dimana semakin tinggi biaya transaksi akan berpengaruh semakin rendah kinerja UKM.

Referensi

- [1] Isa, M. (2020). Strategi Penguatan Dayang Saing UKM Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Daerah Rawan Banjir. *The 11rd University Research Colloquium 2020, Yogyakarta*.
- [2] Badan Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2019. <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/Indeks%20Ketahanan%20Pangan%202018.pdf>
- [3] Isa, M dan Mangifera, L. (2019). Continuous Flood Risk Reduction on MSMEs: Implementation of Mactor Program. *Economic Journal of Emerging Markets*, 11(1), 113–121
- [4] Acemoglu, D., 2003. Root Causes: A Historical Approach to Assessing the Role of Institution in Economic Development. *Finance and Development* Vol.40, No.2, 27-30
- [5] Meramveliotakis, Giorgos dan Dimitris Milonakis. 2010. *Surveying the Transaction Cost Foundations of New Institutional Economics: A Critical Inquiry*. *Journal of Economic Issues*. Vol. XLIV, No. 4, pp. 1045-1071.
- [6] Mburu, John. (2002). *Collaborative Management of Wildlife in Kenya: An Empirical Analysis of Stakeholders' Participation, Costs and Incentives*. Socioeconomic Studies on Rural Development. Vol. 130, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG
- [7] Yustika. AE, 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta. Erlangga
- [8] Hardt, Lukasz. 2009. *The History of Transaction Cost Economics and its Recent Developments*. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*. Vol. 2, Issue 1, pp. 29-51.
- [9] Dequech, David. 2006. *The New Institutional Economics and the Theory of Behaviour Under Uncertainty*. *Journal of Economic Behavior & Organization*. Vol. 59, pp. 109–131
- [10] Duran, Xavier dan Patrick McNutt. 2010. *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*. *International Journal of Social Economics*. Vol. 37, No. 10, pp. 755-763.
- [11] Purbayu Budi Santoso, 2008. *Relevansi dan Aplikasi Airan Ekonomi Kelembagaan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.9, No.1. hal. 46-60

- [12] Fox, Glenn. 2007. *The Real Coase Theorems*. *Cato Journal*. Vol. 27, No. 3, pp. 373-396.
- [13] Creswell, J.W., 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 3rd Edition. London ECIY 1SP UK: SAGE Publication, Ltd.
- [14] Isa, M., Sugiyanto, FX., Susilowati, I. Community resilience to floods in the coastal zone for disaster risk reduction, *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 2018: Vol 10, No 1*
- [15] Isa, M. Fauzi; Indah, A. Susilowati, I. Flood risk reduction in the northern coast of Central Java Province, Indonesia: An application of stakeholder's analysis. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies 2019. 11(1), a660. https://doi.org/10.4102/jamba.v11i1.660*
- [16] Isa, M., Sugiyanto, FX., Susilowati, I. Adaptation and Mitigation Model for People to Restore Their Ecosystem from Flood in Semarang, Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2015: Vol. 16, No 2,*
- [17] Baudry, Bernard dan Virgile Chassagnon. 2010. *The Close Relation Between Organization Theory and Oliver Williamson's Transaction Cost Economics: A Theory of the Firm Perspective*. *Journal of Institutional Economics*. Vol. 6, No. 4, pp. 477–503.
- [18] Biman C. Prasad, 2003. *Institutiona economic and Economic Development (The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and The Environment)*. *Economics Journal*. Vol.30, No.6. pp.741-762
- [19] Cordes, Christian, Peter Richerson, Richard M Celreath, dan Pontus Strimling. 2011. *How Does Opportunistic Behavior Influence Firm Size? An Evolutionary Approach to Organizational Behavior*. *Journal of Institutional Economics*. Vol. 7, No. 1, pp. 1–21.
- [20] Duran, Xavier dan Patrick McNutt. 2010. *Kantian Ethics within Transaction Cost Economics*. *International Journal of Social Economics*. Vol. 37, No. 10, pp. 755-763.
- [21] Malcolm Rutherford, 2001. *Institutional Economics: Then and Now*. *Journal of Economic Perspective*, Vol.15, Number 3, pages 173-194
- [22] Pessali, Huascar F. 2006. *The Rhetoric of Oliver Williamson's Transaction Cost Economics*. *Journal of Institutional Economics*. Vol. 2, No.1, pp. 45-65.
- [23] Prasad, C.Biman, 2003. *Institutional Economics and Economic Development. The Theory of Property rughts, economic development, good governance and the environment*. *International Journal od Social Economics* Vol.30, No.6. Emerald
- [24] Sigmund Warner & Tsukamoto, 2007. *An Institutional Economic Reconstruction Of Scientific Management: On The Lost Theoretical Logic of Taylorism*. *Academic of Management Review*, Vol. 32, No1, 105-117
- [25] Zafrovski, Milan. 2008. *Classical and Neoclassical Conceptions of Rationality— Findings of an Exploratory Survey*. *The Journal of Socio-Economics*. Vol. 37, pp. 789–820.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)